



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 53 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

ef  
fr

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.**

el | | 2

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah alokasi dana bagi Desa paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## **BAB II PENGALOKASIAN**

### **Pasal 2**

Pengalokasian ADD untuk setiap desa mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

### **Pasal 3**

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memperhitungkan penghasilan tetap :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

*Handwritten signature*

- b. Sekretaris Desa (non-PNS) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
- c. Perangkat Desa sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 4**

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan proporsi sebagai berikut :

- a. 37% (tiga puluh tujuh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 13% (tiga belas per seratus) untuk luas wilayah desa;
- c. 43% (empat puluh tiga per seratus) untuk angka kemiskinan desa;
- d. 7 % (tujuh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.

#### **Pasal 5**

Penghitungan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung setelah jumlah ADD yang dianggarkan Kabupaten dikurangi dengan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama satu tahun anggaran.

#### **Pasal 6**

Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENYALURAN**

#### **Pasal 7**

Alokasi Dana Desa disalurkan dari RKUD ke rekening Kas Desa dengan cara pemindahbukuan dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

#### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Pentahapan penyaluran ADD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan Pasal 3;
  - b. penyaluran ADD selain yang digunakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam dua tahap.

*el. f. 7/1*

### **Pasal 9**

Pencairan Alokasi Dana Desa kepada Desa dikaitkan dengan mekanisme pelunasan PBB.

### **Pasal 10**

- (1) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan :
  - a. Tahap I Pencairan sebesar 50% (lima puluh perseratus) tanpa memperhitungkan realisasi PBB diajukan paling lambat akhir bulan April tahun berjalan; dan
  - b. Tahap II dicairkan sesuai dengan persentase realisasi PBB Desa sampai dengan batas akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (2) Desa dapat mencairkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana ADD Tahap I.
- (3) Pengajuan pencairan dana ADD Tahap II paling lambat tanggal 5 Nopember tahun berjalan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 24 Desember 2014

**BUPATI TUBAN,**

**H. FATHUL HUDA,**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 24 Desember 2014

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**

**BUDI WIYANA**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 53TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
 ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TUBAN

**BESARAN ALOKASI DANA DESA  
 KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015**

NO.	KECAMATAN / DESA	ADD (Rp)
(1)	(2)	(3)
<b>1</b>	<b>KEC. KENDURUAN</b>	
	1.1. Jlodro	288,367,822
	1.2. Sokogunung	290,573,673
	1.3. Jamprong	491,990,117
	1.4. Tawaran	364,642,324
	1.5. Sidomukti	502,254,962
	1.6. Bendonglateng	287,718,089
	1.7. Sidohasri	329,820,278
	1.8. Sidorejo	280,241,317
	1.9. Sokogrenjeng	412,123,929
<b>2</b>	<b>KEC. JATIROGO</b>	
	2.1. Kebonharjo	311,483,925
	2.2. Wangi	319,809,879
	2.3. Ketodan	250,403,418
	2.4. Karangtengah	279,464,640
	2.5. Bader	199,707,608
	2.6. Paseyan	267,471,186
	2.7. Besowo	302,912,760
	2.8. Jombok	204,261,335
	2.9. Sadang	335,895,115
	2.10. Wotsogo	384,376,281
	2.11. Ngepon	292,562,314
	2.12. Sugihan	375,473,974
	2.13. Sidomulyo	228,960,619
	2.14. Kedungmakam	243,978,271
	2.15. Demit	250,371,307
	2.16. Jatiklabang	369,695,080
	2.17. Sekaran	333,185,174
	2.18. Dingil	312,069,050
<b>3</b>	<b>KEC. BANGILAN</b>	
	3.1. Klakeh	202,649,407
	3.2. Bate	290,204,645
	3.3. Sidotentrem	446,874,849
	3.4. Kedungjambangan	338,939,931
	3.5. Kablukan	265,118,106
	3.6. Sidokumpul	309,112,498
	3.7. Bangilan	542,476,302
	3.8. Sidodadi	306,398,117
	3.9. Kumpulrejo	453,960,768
	3.10. Banjarworo	492,966,842

*ef n*

(1)	(2)	(3)
	3.11. Ngrojo	213,292,148
	3.12. Weden	235,065,924
	3.13. Kedungharjo	259,656,876
	3.14. Kedungmulyo	362,990,763
<b>4</b>	<b>KEC. BANCAR</b>	
	4.1. Tlogoagung	431,373,617
	4.2. Ngujuran	386,644,091
	4.3. Latsari	378,248,682
	4.4. Sukolilo	278,281,419
	4.5. Tenggerkulon	238,923,625
	4.6. Bulujowo	436,378,962
	4.7. Siding	270,765,131
	4.8. Tergambang	230,520,985
	4.9. Bulumeduro	162,656,888
	4.10. Banjarjo	464,498,645
	4.11. Boncong	207,855,106
	4.12. Jatisari	190,405,239
	4.13. Sumberan	208,954,152
	4.14. Kayen	254,205,064
	4.15. Bogorejo	230,156,048
	4.16. Sembungin	307,878,621
	4.17. Karangrejo	277,941,916
	4.18. Sukoharjo	341,684,820
	4.19. Pugh	271,554,062
	4.20. Bancar	237,036,378
	4.21. Ngampelrejo	304,384,082
	4.22. Sidomulyo	244,948,293
	4.23. Margosuko	300,945,975
	4.24. Cingklung	174,176,335
<b>5</b>	<b>KEC. SENORI</b>	
	5.1. Medalem	478,073,763
	5.2. Jatisari	414,580,752
	5.3. Kaligede	379,210,913
	5.4. Banyuurip	233,957,267
	5.5. Leran	258,611,486
	5.6. Wonosari	268,387,279
	5.7. Sendang	361,359,651
	5.8. Wanglu Kulon	369,339,233
	5.9. Wanglu Wetan	223,499,677
	5.10. Sidoharjo	497,123,864
	5.11. Rayung	523,517,140
	5.12. Katerban	344,075,344
<b>6</b>	<b>KEC. TAMBAKBOYO</b>	
	6.1. Dikir	273,637,805
	6.2. Ngulahan	269,283,362
	6.3. Plajan	174,187,503
	6.4. Mander	362,465,301
	6.5. Belikanget	205,514,180
	6.6. Cokrowati	320,123,552
	6.7. Pulogede	209,982,192

2 | 72

(1)	(2)	(3)
	6.8. Gadon	204,460,177
	6.9. Sotang	184,465,528
	6.10. Pabeyan	235,645,633
	6.11. Klutuk	287,298,318
	6.12. Tambakboyo	294,561,891
	6.13. Dasin	330,712,185
	6.14. Kenanti	187,137,375
	6.15. Sawir	335,653,681
	6.16. Sobontoro	222,179,304
	6.17. Merkawang	275,672,045
	6.18. Glondonggede	277,416,897
<b>7</b>	<b>KEC. SINGGAHAN</b>	
	7.1. Laju Kidul	351,942,350
	7.2. Lajo Lor	353,149,574
	7.3. Tanggir	247,484,796
	7.4. Tanjungrejo	286,536,447
	7.5. Binangun	339,923,697
	7.6. Mergosari	276,694,968
	7.7. Mulyoagung	666,773,985
	7.8. Tunggulrejo	330,071,021
	7.9. Tingkis	341,814,102
	7.10. Mulyorejo	268,734,275
	7.11. Saringambat	403,906,608
	7.12. Kedungjambe	407,660,726
<b>8</b>	<b>KEC. K E R E K</b>	
	8.1. Gemulung	517,156,708
	8.2. Sidonganti	521,574,287
	8.3. Trantang	281,035,850
	8.4. Wolutengah	474,079,664
	8.5. Tenggerwetan	346,202,060
	8.6. G a j i	542,333,424
	8.7. Hargoretno	309,009,749
	8.8. Padasan	285,704,876
	8.9. Margorejo	403,204,107
	8.10. Kedungrejo	321,966,519
	8.11. Jarorejo	397,390,442
	8.12. Mliwang	228,933,154
	8.13. Kasiman	211,663,819
	8.14. Margomulyo	346,428,785
	8.16. Temayang	216,666,085
	8.17. Sumberarum	260,926,921
	8.18. Karanglo	374,910,855
<b>9</b>	<b>KEC. PARENGAN</b>	
	9.1. Sembung	312,641,217
	9.2. Kemlaten	186,885,631
	9.3. Sukorejo	389,648,554
	9.4. Ngawun	275,117,790
	9.5. Mergoasri	221,915,544
	9.6. Kumpulrejo	407,642,861
	9.7. Parangbatu	428,898,160

af fa



(1)	(2)	(3)
	9.8. Wukirharjo	360,806,413
	9.9. Cengkong	206,592,660
	9.10. Brangkal	243,326,507
	9.11. Margorejo	303,783,167
	9.12. Dagangan	405,558,905
	9.13. Suciharjo	381,348,664
	9.14. Pacing	265,868,646
	9.15. Selogabus	384,748,677
	9.16. Sugihwaras	301,332,183
	9.17. Sendangrejo	230,900,764
	9.18. Mojomalang	386,759,260
<b>10</b>	<b>KEC. MONTONG</b>	
	10.1. Guwoterus	345,258,163
	10.2. Nguluhan	230,754,352
	10.3. Tanggulangin	399,759,990
	10.4. Manjung	303,915,595
	10.5. Talangkembar	523,808,671
	10.6. Montongsekar	387,751,946
	10.7. Pakel	318,912,932
	10.8. Sumurgung	496,334,774
	10.9. Bringin	338,546,661
	10.10. Pucangan	441,961,831
	10.11. Maindu	434,245,913
	10.12. Jetak	679,412,579
	10.13. Talun	272,114,625
<b>11</b>	<b>KEC. S O K O</b>	
	11.1. Tluwe	282,100,135
	11.2. Wadung	246,220,076
	11.3. Jati	288,945,015
	11.4. Menilo	267,762,669
	11.5. Cekalang	237,258,711
	11.6. Pandanagung	316,643,903
	11.7. Pram. tergayang	604,260,911
	11.8. Klumpit	452,073,611
	11.9. Simo	358,097,590
	11.10. Mentoro	418,803,575
	11.11. Kendalrejo	252,993,820
	11.12. Nguruan	394,696,761
	11.13. Jegulo	528,272,177
	11.14. Sokosari	505,095,456
	11.15. Bangunrejo	418,145,948
	11.16. Mojoagung	332,447,974
	11.17. Gununganyar	345,875,009
	11.18. Sumurcinde	387,794,131
	11.19. Pandanwangi	306,516,594
	11.20. Sandingrowo	417,518,540
	11.21. Rahayu	333,876,963
	11.22. Glagahsari	257,136,111
	11.23. Kenongosari	280,317,542

22 / 12

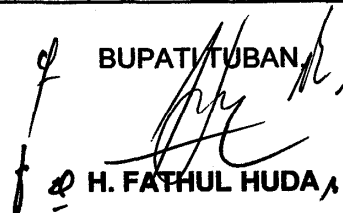
(1)	(2)	(3)
12	<b>KEC. J E N U</b> 12.1. Karangasem 12.2. Socorejo 12.3. Temaji 12.4. Purworejo 12.5. Tasikharjo 12.6. Sumurgeneng 12.7. Suwalan 12.8. R e m e n 12.9. B e j i 12.10. Wadung 12.11. Rawasan 12.12. Mentoso 12.13. Jenggolo 12.14. Kaliuntu 12.15. Sekardadi 12.16. J e n u 12.17. Sugihwaras	310,538,406 351,295,286 477,086,851 255,445,019 286,728,744 348,218,425 292,846,691 307,374,612 415,603,580 298,333,183 276,582,705 301,240,180 353,663,371 274,765,557 225,832,220 225,152,691 461,321,811
13	<b>KEC. MERAKURAK</b> 13.1. Tlogowaru 13.2. T o b o 13.3. Temandang 13.4. Tuwiri Wetan 13.5. Pongpongan 13.6. Tuwirikulon 13.7. Sugihan 13.8. Senori 13.9. Sembungrejo 13.10. K a p u 13.11. Tahulu 13.12. Tegalrejo 13.13. Borehbangle 13.14. Sambonggede 13.15. Sumber 13.16. Mandirejo 13.17. Sendanghaji 13.18. Bogorejo 13.19. Sumberjo	253,150,291 252,763,035 374,372,719 398,488,353 421,109,167 272,657,420 383,611,452 348,823,083 214,602,014 337,566,503 464,792,881 435,103,925 226,827,039 264,588,088 204,254,112 340,223,038 183,062,721 222,783,729 235,894,514
14	<b>KEC. RENGEL</b> 14.1. Kebonagung 14.2. Pekuwon 14.3. Rengel 14.4. Maibit 14.5. Bulurejo 14.6. Karangtinoto 14.7. Sawahan 14.8. Kanorejo 14.9. Tambakrejo 14.10. Ngadirejo 14.11. Sumberejo 14.12. Punggulrejo	241,962,386 419,586,354 524,189,112 393,649,657 380,917,013 319,651,311 265,213,855 264,838,371 248,152,240 247,676,609 359,721,008 403,516,093

efdr

(1)	(2)	(3)
	14.13. Campurejo	301,322,737
	14.14. Banjaragung	320,110,584
	14.15. Banjararum	372,035,981
	14.16. Prambonwetan	260,037,540
<b>15</b>	<b>KEC. SEMANDING</b>	
	15.1. J a d i	652,033,926
	15.2. B o t o	246,046,137
	15.3. Prunggahan Kulon	834,728,913
	15.4. Tegalagung	286,156,575
	15.5. Bektiharjo	754,027,370
	15.6. N g i n o	364,288,341
	15.7. Prunggahan Wetan	196,018,001
	15.8. Sambongrejo	339,836,886
	15.9. Semanding	253,688,622
	15.10. Bejagung	318,089,307
	15.11. Penambangan	533,023,935
	15.12. Genaharjo	469,824,573
	15.13. Kowang	400,017,083
	15.14. T u n a h	415,693,660
	15.15. G e s i n g	349,682,687
<b>16</b>	<b>KEC. TUBAN</b>	
	16.1. Sumurgung	473,439,980
	16.2. Sugiharjo	443,920,272
	16.3. Kembangbilo	300,549,052
<b>17</b>	<b>KEC. PLUMPANG</b>	
	17.1. Trutup	261,925,637
	17.2. Kesamben	449,850,772
	17.3. Kepohagung	365,265,634
	17.4. Kedungrojo	297,881,057
	17.5. Sumurjalak	452,403,589
	17.6. Sembungrejo	246,915,174
	17.7. Sumberagung	607,938,279
	17.8. Cangkring	212,427,620
	17.9. Plumpang	683,060,164
	17.10. Plandirejo	314,429,832
	17.11. Ngrayung	227,301,486
	17.12. Bandungrejo	324,677,554
	17.13. Jatimulyo	380,724,816
	17.14. Klotok	601,842,365
	17.15. Magersari	496,298,900
	17.16. Kebomlati	401,042,097
	17.17. Penidon	625,773,646
	17.18. Kedungsoko	422,661,731
<b>18</b>	<b>KEC. PALANG</b>	
	18.1. Tasikmadu	394,782,880
	18.2. Tegalbang	335,144,854
	18.3. Sumurgung	242,517,935
	18.4. Kradenan	260,317,037
	18.5. Dawung	285,882,865

ef fr

(1)	(2)	(3)
	18.6. Cendoro	355,801,340
	18.7. Ngimbang	404,243,891
	18.8. Pucangan	351,945,361
	18.9. Gesikharjo	338,387,414
	18.10. Palang	308,387,677
	18.11. Glodog	339,462,927
	18.12. Lerankulon	486,326,907
	18.13. Leranwetan	416,481,691
	18.14. Wangun	368,159,496
	18.15. Karangagung	505,316,507
	18.16. Pliwetan	192,286,910
	18.17. Cepokorejo	356,613,369
	18.18. Ketambul	308,703,636
<b>19</b>	<b>KEC. WIDANG</b>	
	19.1. Patihan	361,788,374
	19.2. Minohorejo	409,936,183
	19.3. Mrutuk	356,601,899
	19.4. Comprong	287,300,419
	19.5. Sumberjo	365,698,305
	19.6. Ngadipuro	344,935,641
	19.7. Ngadirejo	310,099,917
	19.8. Bunut	214,977,932
	19.9. Widang	441,340,202
	19.10. Banjar	178,757,985
	19.11. Tegalsari	273,943,874
	19.12. Mlangi	415,568,301
	19.13. Simorejo	383,349,597
	19.14. Kedungharjo	240,087,260
	19.15. Kujung	242,327,924
	19.16. Tegalrejo	266,597,381
<b>20</b>	<b>KEC. GRABAGAN</b>	
	20.1. Ngarum	229,929,876
	20.2. Ngrejeng	336,793,342
	20.3. Banyubang	447,239,477
	20.4. Grabagan	637,051,420
	20.5. Waleran	510,905,384
	20.6. Gesikan	547,733,483
	20.7. Ngandong	541,192,335
	20.8. D a h o r	259,932,460
	20.9. Dermawuharjo	244,296,768
	20.10. Menyunyur	180,762,122
	20.11. P a k i s	277,817,491
	<b>TOTAL</b>	<b>105,655,857,760</b>


  
 BUPATI TUBAN,
   
 H. FATHUL HUDA,